

**DANA MINYAK TIMOR-LESTE**  
**RANCANGAN UNDANG-UNDANG**



**KONSULTASI UMUM**

**KEMENTERIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN**  
**DAN**  
**KELOMPOK PENGARAH DANA MINYAK**

**Februari 2005**

Documen ini bisa didapatkan dari [www.mopf.gov.tp](http://www.mopf.gov.tp) dan [www.timorseaoffice.gov.tp](http://www.timorseaoffice.gov.tp)  
Komentar dapat dikirimkan ke email [petroleum-fund@mopf.gov.tp](mailto:petroleum-fund@mopf.gov.tp)

Rancangan Undang-Undang (UU) ini disiapkan oleh Kelompok Pengarah Pendapatan Minyak.  
Para peserta dalam Kelompok Pengarah: Menteri Keuangan Snr Boavida, Sekretaris Negara Sr Texeira,  
Wakil Menteri Keuangan Snr Bassarewan, Sn Vasconselos (BPA), Sr Antunes (Kantor PM),  
Sr de Lemos (Kantor Laut Timor), Sr Freitas (Kementerian Perencanaan & Keuangan, Seksi Anggaran), Sr  
Almeida (Layanan Pendapatan, Kementerian Perencanaan & Keuangan),  
Sr Maitra (Bendahara, Kementerian Perencanaan & Keuangan), Sr Gusmao (Unit Makroekonomi, Kementerian  
Perencanaan & Keuangan), Sr Ekeli (Penasihat Pendapatan Minyak, Kementerian Perencanaan & Keuangan)

## Ringkasan Eksekutif

Tujuan dari Undang-Undang ini adalah untuk membuat sebuah dana minyak untuk Timor-Leste. Ketentuan-ketentuan di dalam Undang-Undang mencerminkan bahan diskusi mengenai kunci-kunci pokok kebijakan yang dikeluarkan pada 18 Oktober 2004, juga submisi-submisi yang diterima selama konsultasi-konsultasi secara luas dengan masyarakat umum. (Dokumen-dokumen ini tersedia di [www.mopf.gov.tp](http://www.mopf.gov.tp))

Tujuan dari konsultasi dengan masyarakat umum adalah untuk mendapatkan komentar dari masyarakat sipil dan masyarakat luas mengenai rancangan Undang-Undang pada tanggal 1 Maret 2005. Setelah mempertimbangkan submisi-submisi, Pemerintah akan mengajukan Undang-Undang Pembuatan Dana Pendapatan Minyak kepada Parlemen. Rancangan ini harus disetujui oleh Parlemen dan Pengumuman oleh Presiden, Dana Pendapatan Minyak dapat berlaku dari 1 Juli 2005 (Permulaan tahun anggaran 2005-2006).

Rancangan Dana Pendapatan Minyak didasarkan pada prinsip-prinsip utama berikut ini:

- **Dana Minyak harus menjadi perangkat yang dapat memberikan kontribusi kepada manajemen sumber daya minyak Timor-Leste yang bijaksana,** demi manfaat bagi kedua generasi, generasi sekarang dan masa yang akan datang.
- **Dana Minyak berdasarkan praktek internasional yang terbaik dan mencerminkan situasi-situasi Timor-Leste.** Ini didasarkan pada dana minyak yang digunakan di Norwegia, salah satu dari beberapa model yang secara internasional terlihat secara umum dapat berfungsi baik dan memberikan kontribusi kepada sebuah manajemen kekayaan minyak secara umum. Model yang diusulkan untuk Timor-Leste saat ini mengikuti model "Norwegia Plus", mencerminkan pertanggungjawaban tambahan, keterbukaan, dan gambaran-gambaran informasi yang lengkap yang dinilai cocok untuk situasi Timor-Leste.
- **Dana Minyak berdasarkan Konstitusi.** Undang-undang Pendapatan Minyak meletakkan parameter-parameter pokok untuk pelaksanaan dan manajemen dana sesuai dengan Pasal 139 Konstitusi, yang menyatakan bahwa sumber-sumber minyak seharusnya dimiliki oleh Negara, seharusnya digunakan dengan cara yang adil dan layak sesuai dengan kepentingan-kepentingan nasional, dan ekstraksi minyak seharusnya mengarah pada pembuatan cadangan keuangan sesuai yang telah ditetapkan. Dana Minyak yang diusulkan berdasarkan pada kerangka kerja konstitusi, memberikan kekuasaan kepada Parlemen dan Pemerintah yang sesuai dengan kompetensi-kompetensi (kewenangan-kewenangan) mereka.
- **Dana Minyak membolehkan penguatan pertanggungjawaban, kekuasaan-kekuasaan, dan kapasitas institusi-institusi sektor publik utama,** seperti Parlemen, Pemerintah, Kementerian Perencanaan dan Keuangan dan Bank Sentral. Akan ada Dewan Penasihat Penanaman Modal yang memberikan nasihat kepada Menteri Perencanaan dan Keuangan untuk meningkatkan kualitas nasihat proses pembuatan keputusan. Juga akan ada sebuah Dewan Konsultasi yang independen untuk

memberikan nasihat kepada Parlemen mengenai penggunaan Dana Minyak, bertindak sebagai “pengawas” dan memberikan kontribusi pada sebuah debat umum terbuka dan manajemen kekayaan minyak yang logis.

- **Dana Minyak akan menjadi perangkat yang memberikan kebijakan fiskal yang logis**, dan karenanya membantu memberikan sebuah dasar pertumbuhan ekonomi dan memperbaiki layanan-layanan umum. Rancangan Dana Minyak mengakui bahwa perencanaan dan pelaksanaan anggaran-anggaran sektor publik yang baik adalah kunci utama untuk mencegah kutukan sumber daya alam yang terjadi di banyak sekali negara-negara produksi minyak. Dana Minyak menyatu secara koheren dengan proses penganggaran, mendukung sebuah kerangka kerja kebijakan fiskal yang mencapai keseimbangan yang benar antara pembelanjaan waktu sekarang, menanamkannya dalam bentuk asset-asset fisik (pembangunan infrastruktur dan manusia) dan asset-asset keuangan.
- **Dana Minyak akan dikelola secara bijaksana**, diinvestasikan secara aman dalam bentuk asset-asset keuangan dengan resiko yang rendah di luar negeri.
- **Manajemen Dana Minyak seharusnya dilaksanakan dengan standar transparansi dan pertanggungjawaban tertinggi**. Ini merupakan elemen utama dalam membangun kepercayaan dan dukungan publik bagi sebuah strategi mengelola sumber-sumber daya minyak dengan bijaksana. Ini akan mengijinkan Timor-Leste mencegah pengalaman-pengalaman negatif yang terjadi di banyak sekali negara-negara produksi minyak, dimana minyak telah terbukti menjadi sebuah bencana daripada memberikan kesejahteraan.

Undang-Undang Dana Minyak mempunyai ciri-ciri utama sebagai berikut:

- **Dana Pendapatan Minyak:** semua pendapatan yang berasal dari sumber-sumber minyak secara langsung dan tidak langsung akan dimasukkan ke dalam Dana Minyak, juga kembali kepada investasi-investasi Dana Minyak (pendapatan bersih dari pengeluaran manajemen). Semua pendapatan Dana Minyak akan masuk ke dalam sebuah ‘rekening penerimaan peruntukan (*‘earmarked receipts account’*). Pembukuan Dana Minyak pada 1 Juli 2005 akan menjadi pembayaran-pembayaran minyak tahap pertama yang diakumulasikan, ditambah sebuah jumlah yang ditentukan oleh Pemerintah untuk memperoleh rekening pendapatan-pendapatan minyak tertinggi selama tahun fiskal waktu sekarang. [Pasal 5 dan 6]
- **Pengeluaran Dana Minyak:** pemindahan-pemindahan dari Dana Minyak hanya bisa dilakukan pada sebuah rekening Anggaran Negara yang telah ditentukan, dan jumlah semua pemindahan-pemindahan dalam sebuah tahun fiskal tidak dapat melebihi batas tertinggi yang ditetapkan oleh Parlemen pada saat menyetujui Anggaran Negara. Batas tertinggi akan menjadi sebuah peraturan umum yang cocok dengan jumlah uang yang diperlukan untuk defisit keuangan Anggaran Negara tidak termasuk pendapatan-pendapatan minyak. Anggaran disetujui oleh Parlemen memutuskan tingkat pendapatan pajak dan pengeluaran dalam negeri – menjadikannya konsumsi publik dalam waktu sekarang atau penanaman modal di infrastruktur dan manusia. Karena ini merupakan kebutuhan mendanai Anggaran yang menentukan pengeluaran dari

Dana Minyak, Anggaran juga akan menentukan alokasi pendapatan bersih ke Dana Minyak yang diinvestasikan pada asset-asset keuangan. Ini menciptakan sebuah hubungan langsung antara Anggaran yang disetujui oleh Parlemen dan pengembangan Dana Minyak, dan Dana Minyak akan memberikan sebuah perwakilan yang baik dari suku bunga tabungan Pemerintah dan posisi asset-asset pendapatan bersih keuangan [Pasal 7]

- Pemerintah secara terpisah mengesahkan sebuah kebijakan tabungan/pengeluaran yang menjaga nilai nyata kekayaan minyak, yang akan melayani sebagai sebuah referensi untuk menentukan jumlah uang yang seharusnya keluar dari Dana Minyak. Kebijakan ini menerjemahkan pembelanjaan pendapatan berkelanjutan yang telah diperkirakan dari Dana Minyak, yang mana jumlah ini bisa digunakan selama tiap-tiap tahun dan oleh karena itu bisa dikatakan memperoleh sebuah keseimbangan yang baik antara kepentingan-kepentingan di masa sekarang dan generasi-generasi di masa datang. Pada masa perhitungan sekarang, kebijakan ini memperuntukkan sebuah penambahan yang penting dalam pembelanjaan Pemerintah dalam jangka waktu menengah.
- Undang-Undang mempunyai syarat-syarat pelaporan yang khusus yang memaksa Pemerintah dan Dewan Konsultasi jika Anggaran Negara mengusulkan menarik dari Dana Minyak lebih dari **pendapatan berkelanjutan yang diperkirakan dari minyak**. Pada saat itu bisa menjadi alasan-alasan yang baik untuk membelanjakan/menggunakan lebih dari pendapatan berkelanjutan yang diperkirakan, ketentuan-ketentuan di dalam Undang-Undang sebaiknya memberikan kontribusi untuk memastikan bahwa keputusan-keputusan seperti ini transparan dan diinformasikan dengan baik. [Pasal 7 dan 17]
- **Manajemen Dana Minyak:** Pemerintah mempunyai tanggung jawab atas semua manajemen Dana Minyak, dan Menteri Perencanaan dan Keuangan akan melaksanakan fungsi-fungsi dan kompetensi-kompetensi utama. Manajemen operasional akan didelegasikan kepada Bank Sentral sesuai dengan perjanjian manajemen, dan dipertimbangkan bahwa akan diangkat manajer-manajer investasi lain. [Pasal 8]
- **Dewan Penasihat Investasi** adalah seorang dewan ahli yang akan memberikan nasihat kepada Menteri mengenai persoalan-persoalan lain yang berkaitan dengan manajemen Dana Minyak. Para anggota Dewan akan mencakup Direktur Perbendaharaan, Kepala Bank Sentral, dua orang dengan pengalaman yang penting dalam manajemen investasi dan satu orang lain. [Pasal 10]
- **Investasi Dana Minyak:** sejak awal tabungan Dana Minyak diinvestasikan dalam asset keuangan secara aman dengan resiko rendah di luar negeri. Undang-Undang menetapkan bahwa investasi harus dalam Dolar Amerika sebagai instrumen hutang dengan resiko kredit rendah (posisi kredit minimum Aa3 oleh Moody atau AA- oleh S&P). Ini akan dipraktekkan dalam investasi menengah kebanyakan dalam surat tanggungan Pemerintah, yang berarti bahwa resiko keuangan sepertinya dibatasi dan investasi yang diharapkan kembali dengan cukup. Strategi investasi akan ditinjau kembali dalam waktu lima tahun, ketika sebuah Dana yang lebih besar dan kapasitas kelembagaan meningkat bisa disarankan sebuah alokasi asset yang berbeda. [Pasal 9]

- **Akan ada audit eksternal yang independen, audit eksternal** dilaksanakan oleh sebuah firma akuntan yang diakui secara internasional untuk mendukung kepercayaan penggunaan uang, dari atau sisa Dana tidak salah penggunaan. Auditor eksternal juga akan menandai perhitungan pendapatan berkelanjutan yang diperkirakan, dan menyiapkan sebuah laporan mengenai pembayaran yang dibuat oleh perusahaan-perusahaan sebagai penerimaan Dana Minyak. [Pasal 1, 7, 14, 20 dan 23]
- **Akan ada Dewan Konsultasi Independen.** Dewan akan menasihati Parlemen mengenai penggunaan Dana, bertindak sebagai ‘‘pengawas’’ dan memberikan kontribusi kepada debat publik terbuka dan sebuah manajemen kekayaan minyak yang logis. Para anggota Dewan akan diangkat oleh Presiden, Parlemen, Pemerintah dan masyarakat sipil, dan akan ditambahi kursi untuk mantan Presiden, Para Pembicara Parlemen, Perdana Menteri, Menteri Keuangan dan Kepala-kepala Bank Sentral. [Pasal 15, 16 dan 17]
- **Ada ciri-ciri pertanggungjawaban, keterbukaan (transparansi) dan informasi** memberikan kontribusi pada sebuah manajemen kekayaan minyak yang bijaksana. Akan ada sebuah tingkat yang tinggi mengenai transparansi operasional, termasuk syarat-syarat pelaporan yang komprehensif dan mudah diakses – keduanya, pada manajemen Dana dan apakah penggunaan pendapatan-pendapatan minyak konsisten dengan pertimbangan-pertimbangan jangka panjang. Ada juga syarat-syarat informasi mengenai pembayaran-pembayaran yang dibuat oleh perusahaan-perusahaan sebagai penerimaan Dana Minyak, yang merupakan elemen utama Inisiatif Transparansi Industri Produksi Bahan Baku (*the Extractive Industries*). [Pasal 7, 10, 14, 17, 18 dan 20]

## **RANCANGAN UNDANG-UNDANG**

**Undang-Undang No. .../2005**

**Tanggal .... ..... 2005**

Undang-undang ini membuat sebuah Dana Minyak yang berusaha untuk sesuai dengan persyaratan konstitusional yang diletakkan dalam Pasal 139 di dalam Konstitusi Republik. Ketentuan ini menyatakan bahwa sumber-sumber daya minyak seharusnya dimiliki oleh Negara, seharusnya digunakan dengan cara yang adil dan layak sesuai dengan kepentingan-kepentingan nasional, dan ekstrasi minyak seharusnya mengarah pada pembuatan cadangan-cadangan keuangan sesuai yang telah ditetapkan.

Dana Minyak akan memberikan kontribusi pada sebuah manajemen sumber-sumber daya minyak yang bijaksana demi keuntungan kedua generasi, sekarang dan masa depan. Dana Minyak seharusnya menjadi sebuah perangkat yang memberikan kontribusi pada kebijakan keuangan yang logis, dimana pertimbangan dan beban yang tepat diberikan pada kepentingan-kepentingan jangka panjang warga negara Timor-Leste.

Perencanaan yang efisien dan pelaksanaan yang tepat dari anggaran-anggaran sektor publik merupakan komponen-komponen utama manajemen kekayaan minyak yang logis. Dana minyak Dana Minyak menyatu secara koheren dalam Anggaran Negara, dan memberikan sebuah perwakilan yang baik atas pengembangan keuangan-keuangan publik. Dana Minyak seharusnya dikelola dengan bijaksana dan akan beroperasi dalam sebuah kebiasaan yang terbuka dan transparan, dalam kerangka kerja sesuai konstitusi.

Undang-undang ini meletakkan parameter-parameter utama bagi pelaksanaan dan manajemen Dana Minyak. Undang-Undang mengatur pengambilan dan manajemen penerimaan-penerimaan bersama-sama dengan kekayaan minyak, mengatur pemindahan-pemindahan ke Anggaran Negara, dan menyediakan pertanggungjawaban dan kelalaian kegiatan-kegiatan ini bagi Pemerintah.

Oleh karena itu, sesuai dengan Pasal 139 Konstitusi dan tujuan pembuatan sebuah dana pendapatan dari eksploitasi sumber-sumber daya minyak yang tidak dapat diperbaharui bagi kebutuhan kedua generasi, sekarang dan masa mendatang, Pemerintah mengajukan rancangan undang-undang kepada Parlemen Nasional, menunjuk paragraf c), item 1, Pasal 97, dan paragraf a), item 2, Pasal 115, Konstitusi Republik, sebagai berikut:

### **Bab I – Ketentuan-Ketentuan Umum**

#### **Pasal 1**

#### **Penyebutan**

Undang-undang ini bisa disebut sebagai Undang-Undang Dana Minyak.

#### **Pasal 2**

#### **Definisi-Definisi**

1.1 Di dalam Undang-Undang ini, kecuali konteks mensyaratkan, kalau tidak:

“Bank Sentral” berarti pihak yang berwenang yang didirikan sesuai Ketentuan 143 Konstitusi Republik atau, hingga pihak yang berwenang seperti ini didirikan, yang berwenang adalah Otoritas Perbankan dan Pembayaran (*the Banking and Payments Authority*);

“Kode” berarti Kode Pertambangan Minyak yang disetujui dan disahkan oleh Timor-Leste dan Australia sesuai Pasal 7 Perjanjian, sebagaimana diamandemen, diubah, dimodifikasi, atau digantikan dari waktu ke waktu, dan regulasi-regulasi dan keputusan-keputusan yang dikeluarkan di bawahnya;

“Pendapatan Berkelanjutan yang Diperkirakan” untuk sebuah tahun keuangan berarti jumlah yang ditentukan sesuai dengan formula yang dibuat dalam Jadwal 1;

“Nilai Tukar Mata Uang” berarti:

- (a) Nilai Tukar Mata Uang merupakan sebuah Perjanjian antara Pemerintah Australia dan UNTAET, pada 10 Februari 2000; atau
- (b) Nilai Tukar Mata Uang merupakan sebuah Perjanjian antara Pemerintah Timor-Leste dan Pemerintah Australia, pada 20 Mei 2002.

“tahun keuangan” berarti jangka waktu duabelas (12) bulan dari 1 Juli hingga 30 Juni;

“auditor independen” berarti auditor yang diangkat, dari waktu ke waktu, demi tujuan mengaudit rekening-rekening Pemerintah sebagaimana ditentukan oleh hukum Timor-Leste, atau firma akuntan yang secara internasional diakui, diangkat sesuai dengan Pasal 23;

“manajer investasi” berarti Bank Sentral dan setiap orang yang diangkat sebagai manajer investasi menurut Pasal 8;

“Menteri” berarti Menteri Keuangan;

“Parlemen” berarti Parlemen Nasional Timor-Leste;

“minyak” mempunyai arti yang sama yang diberikan di dalam Undang-Undang Minyak;

“Undang-Undang Minyak” berarti Undang-Undang Minyak, tahun 2005, sebagaimana diamandemen, diubah, dimodifikasi atau digantikan dari waktu ke waktu, dan regulasi-regulasi yang dikeluarkan di bawah Undang-Undang Minyak;

“Otorisasi Minyak” berarti:

- (a) Sebuah otorisasi akses, sebuah kontrak minyak, sebuah otorisasi yang berprospek atau sebuah otorisasi penggunaan tirisan, atau setiap perjanjian yang dibuat dalam hal otorisasi semacam atau kontrak, dijamin atau diberlakukan menurut Undang-Undang Minyak; atau
- (b) Sebuah otorisasi atau kontrak pembagian produksi, atau setiap perjanjian yang dibuat dalam hal sebuah otorisasi atau kontrak, dijamin atau diberlakukan menurut Kode;

“Dana Minyak” berarti Dana Minyak untuk Timor-Leste dibuat menurut Pasal 5;

“Penerimaan-Penerimaan Dana Minyak” mempunyai arti yang diberikan dalam Pasal 6;

“Operasional Minyak” berarti kegiatan-kegiatan yang disahkan menurut sebuah otorisasi minyak;

“Anggaran Negara” berarti Anggaran Negara menunjuk pada Ketentuan 145 Konstitusi Republik;

“Pendapatan pajak” berarti setiap pajak atau bea yang dipaksakan menurut hukum Timor-Leste;

“Timor-Leste” berarti Republik Demokrasi Timor-Leste; dan

“Perjanjian” berarti Perjanjian Laut Timor antara Pemerintah Timor-Leste dan Pemerintah Australia ditandatangani pada 20 Mei 2002, sebagaimana diamandemen, diubah, dimodifikasi atau digantikan dari waktu ke waktu.

2.2 Semua istilah-istilah dalam Undang-Undang ini didefinisikan di dalam hukum Timor-Leste mengenai anggaran dan manajemen keuangan mempunyai arti yang sama yang diberikan di dalam hukum tersebut.

### Pasal 3 Cakupan Undang-Undang

Undang-Undang ini akan menyediakan pembuatan dan manajemen Dana Minyak, dan aturan-aturan sesuai prosedur berkaitan dengan hal-hal tersebut.

### Pasal 4 Ketidakkonsistenan

Demi tujuan Undang-Undang ini, dalam kejadian setiap ketidakkonsistenan antara ketentuan-ketentuan Undang-Undang Timor-Leste mengenai anggaran dan manajemen keuangan, ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang ini seharusnya berlaku.

## **Bab II – Dana Minyak untuk Timor-Leste**

### Pasal 5 Dana Minyak untuk Timor-Leste

5.1 Dengan ini telah ada sebuah Dana yang dikenal sebagai Dana Minyak untuk Timor-Leste.

5.2 Dana Minyak seharusnya mempunyai sebuah rekening penerimaan peruntukan ke dalam penerimaan-penerimaan Dana Minyak dikredit yang ditetapkan di dalam Pasal 6. Pemindahan-pemindahan dari Dana Minyak seharusnya dilakukan hanya jika sesuai dengan Pasal 7.

### Pasal 6 Penerimaan-Penerimaan Dana Minyak

6.1 Berikut adalah jumlah penerimaan-penerimaan Dana Minyak:

- (a) Pendapatan kotor, termasuk pendapatan pajak Timor-Leste dari setiap operasional minyak, termasuk untuk eksplorasi dan operasional yang berprospek, dan pembangunan, eksploitasi, transportasi, penjualan atau ekspor minyak, dan kegiatan-kegiatan lain yang berkaitan dengan hal-hal tersebut;
- (b) Setiap jumlah yang diterima oleh Timor-Leste dari Otoritas yang Ditunjuk sesuai dengan Perjanjian;
- (c) Setiap jumlah yang diterima oleh Timor-Leste dari investasi penerimaan-penerimaan Dana Minyak, penerimaan bersih pengeluaran manajemen termasuk pembayaran kepada Bank Sentral sesuai perjanjian manajemen yang ditunjuk di dalam Pasal 8.3;
- (d) Setiap jumlah yang diterima dari partisipasi Timor-Leste secara langsung atau tidak langsung dalam operasional-operasional minyak; dan



- (e) Setiap jumlah yang diterima oleh Timor-Leste berkaitan dengan sumber-sumber daya minyak baik secara langsung atau tidak langsung yang tidak dicakup dalam subparagraf (a) hingga (d).

6.2 Pembukaan sisa Dana Minyak adalah jumlah total pembayaran yang diterima oleh Timor-Leste, hingga peralihan Undang-Undang ini, sebagai Pembagian Tahap Pertama Minyak, dari Otoritas Bersama sesuai dengan syarat-syarat nilai tukar mata uang, atau dari Otoritas Pembagian ke syarat-syarat Perjanjian, bertambah beberapa jumlah, jika ada, sebagaimana ditentukan oleh Pemerintah.

### Pasal 7 Pemindahan-Pemindahan

7.1 Hanya hutang ke Dana Minyak yang diijinkan dalam bentuk pemindahan elektronik dibuat sesuai dengan Pasal ini ke piutang satu rekening Anggaran Negara.

7.2 Jumlah total yang dipindahkan dari Dana Minyak untuk satu tahun fiskal tidak akan melebihi jumlah dana yang disetujui oleh Parlemen untuk tahun fiskal. Tunduk pada Pasal 7.3, pemindahan dari Dana Minyak oleh Bank Sentral dalam tahun fiskal, hanya bisa dilakukan setelah penerbitan hukum anggaran, atau setiap perubahan berikutnya, dalam *Jornal da República*, menegaskan jumlah dana yang disetujui oleh Parlemen untuk tahun fiskal saat itu.

7.3 Tunduk pada Pasal 7.4, tidak ada pemindahan yang akan dibuat dari Dana Minyak dalam tahun fiskal kecuali Pemerintah telah menyediakan laporan-laporan berikut kepada Parlemen:

- (a) Menegaskan pendapatan berkelanjutan yang diperkirakan untuk tahun fiskal yangmana telah dilakukan pemindahan;
- (b) Menegaskan pendapatan berkelanjutan yang diperkirakan untuk tahun fiskal berjalan; dan
- (c) Dari auditor independent menandai jumlah pendapatan berkelanjutan yang diperkirakan dalam paragraf (a) and (b).

7.4 Tidak ada pemindahan akan dibuat dari Dana Minyak dalam satu tahun fiskal melebihi pendapatan berkelanjutan diperkirakan untuk tahun fiskal kecuali Pemerintah telah menyediakan laporan-laporan berikut kepada Parlemen:

- (a) Laporan yang dijelaskan dalam Pasal 7.3(a) dan (b);
- (b) Sebuah laporan yang memperkirakan jumlah dengan pendapatan berkelanjutan yang diperkirakan untuk tahun-tahun fiskal peralihan setelah tahun fiskal untuk pemindahan yang dibuat untuk dikurangi sebagai sebuah hasil pemindahan dari Dana Minyak dari jumlah yang melebihi pendapatan berkelanjutan yang diperkirakan dari tahun fiskal saat pemindahan dilakukan;
- (c) Sebuah laporan dari auditor independen yang menandai perkiraan pengurangan dalam pendapatan berkelanjutan yang diperkirakan dalam paragraf (b); dan
- (d) Sebuah penjelasan yang lengkap mengapa ini merupakan kepentingan jangka panjang Timor-Leste untuk memindahkan sejumlah dana melebihi pendapatan berkelanjutan yang diperkirakan dari Dana Minyak.

7.5 Pemindahan-pemindahan dari Dana Minyak diijinkan untuk tujuan-tujuan pembayaran kembali pajak dengan pengecualian ketika terjadi pembayaran pajak berlebihan menurut Pasal 6.1(a). jumlah ini mewakili pengurangan penerimaan-penerimaan Dana Minyak, dan tidak dipertimbangkan sebagai bagian dari dana yang disetujui menurut Pasal 7.2.

### **Bab III – Aturan-Aturan Investasi dan Perlindungan**

Pasal 8  
Manajemen Dana Minyak

8.1 Pemerintah bertanggung jawab atas keseluruhan manajemen Dana Minyak. Dalam pelaksanaan setiap fungsi-fungsi dan kewenangan-kewenangan manajemen yang dipercayakan kepadanya, Menteri harus bertanggung jawab kepada Perdana Menteri, dan keduanya harus mempertanggungjawabkan di depan Dewan Menteri dan Parlemen.

8.2 Menteri tidak akan membuat keputusan apapun atas strategi investasi atau manajemen Dana Petroleum tanpa meminta nasihat lebih dahulu kepada Dewan Penasihat Investasi sesuai Pasal 10.

8.3 Menteri akan membuat sebuah perjanjian dengan Bank Sentral untuk manajemen operasional Dana Minyak dan Bank Sentral harus bertanggung jawab atas manajemen operasional Dana Minyak.

8.4 Bank Sentral bisa mengusulkan pengangkatan satu atau lebih dari satu manajer investasi untuk bertanggung jawab atas pengelolaan jumlah investasi dalam Dana Minyak kepada Menteri, baik mosinya sendiri atau atas permintaan Menteri.

8.5. Bank Sentral bisa mengangkat seorang manajer investasi yang diusulkan Pasal 8.4 hanya jika Menteri puas bahwa:

- (a) Manajer investasi adalah seorang yang berlatarbelakang hukum dengan modal yang cukup wajar dan jaminan yang memadai dan asuransi atas resiko-resiko operasional;
- (b) Manajer investasi mempunyai latar belakang operasional yang boleh dipercaya dan keahlian keuangan; dan
- (c) Referensi dan reputasi manajer investasi dalam bidang manajemen dana adalah standar yang paling tinggi.

8.6 Prosedur-prosedur penawaran Pemerintah harus diikuti untuk setiap pengangkatan sesuai Pasal 8.5.

8.7 Dana Minyak harus dikelola dengan bijaksana sesuai dengan prinsip pemerintahan yang baik demi keuntungan generasi-generasi sekarang dan masa datang. Tugas manajer investasi adalah untuk memaksimalkan kembalinya investasi-investasi Dana Minyak dengan memperhatikan resiko yang pantas sebagaimana diukur oleh investasi-investasi yang dibolehkan menurut Pasal 9, setiap perundang-undangan pengganti menurut Undang-Undang ini, setiap instruksi-instruksi oleh Menteri dan perjanjian manajemen yang ditunjuk dalam Pasal 8.3.

8.8 Bank Sentral akan mengajukan laporan empat bulanan mengenai situasi dan kegiatan-kegiatan Dana Minyak tidak lebih dari duapuluh (20) hari setelah hari terakhir masing-masing empat bulan kepada Menteri. Bank Sentral akan menyediakan penerbitan untuk laporan-laporannya dalam bentuk dan cara yang bisa digunakan untuk informasi umum tidak lebih dari empatpuluh (40) hari setelah hari terakhir empat bulan. Bank Sentral akan memastikan bahwa dalam mengeluarkan, atau mengizinkan akses atas laporan-laporan diambil untuk mencegah kebocoran informasi yang dirahasiakan.

Pasal 9  
Aturan-Aturan Investasi

9.1 Jumlah uang di dalam Dana Minyak harus diinvestasikan hanya dalam perangkat yang berkualitas dijelaskan dalam Pasal 9.2.

9.2 Tunduk pada Pasal 9.3, sebuah perangkat berkualitas adalah:

- (a) Sebuah perangkat hutang dalam satuan Dolar Amerika yang menanggung kepentingan atau sejumlah uang yang setara dengan suku bunga, yaitu:
  - (i) Rata-rata Aa3 atau lebih tinggi menurut agen peringkat Moody atau rata-rata AA– atau lebih tinggi menurut agen peringkat Standard & Poor; dan
  - (ii) Dikeluarkan oleh atau dijamin oleh Bank Dunia atau oleh negara yang berdaulat, selain Timor-Leste, menyediakan rata-rata Aa3 atau lebih tinggi menurut agen peringkat Moody atau rata-rata AA – atau lebih tinggi menurut agen peringkat Standard & Poor kepada pihak yang mengeluarkan atau penjamin; atau
- (b) Deposito atau perangkat hutang dalam satuan Dolar Amerika yang menanggung kepentingan-kepentingan atau sejumlah uang yang setara dengan suku bunga yang dikeluarkan oleh:
  - (i) Bank untuk Penyelesaian International;
  - (ii) Bank Tabungan Federal Amerika Serikat (*the Federal Reserve Bank of the United States*); atau
  - (iii) Bank Sentral negara yang berdaulat, selain Timor-Leste, dengan peringkat nilai tukar mata uang asing sesuai peringkat Aa3 atau lebih tinggi menurut agen peringkat Moody atau AA – atau lebih tinggi menurut agen peringkat Standard & Poor, dalam jangka panjang.

9.3 Manajer investasi akan mengatur sebuah perangkat jika perangkat menjadi sebuah perangkat yang berkualitas karena perubahan peringkat perangkat atau pihak yang mengeluarkan perangkat dalam satu bulan perangkat tersebut berhenti menjadi sebuah perangkat yang berkualitas.

9.4 Jangka waktu rata-rata suku bunga perangkat berkualitas Dana Minyak menurut Pasal 9.2 harus kurang dari enam (6) tahun.

9.5 Sebuah perangkat salinan yang memenuhi Pasal 9.2 adalah sebuah perangkat yang berkualitas hanya jika pembukaan keuangan tidak melebihi pembukaan yang telah akan dihasilkan dari investasi secara langsung dalam perangkat pokok yang mendasari.

9.6 Jarak perangkat-perangkat termasuk perangkat-perangkat yang berkualitas dalam Pasal 9.2 harus ditinjau ulang oleh Menteri pada akhir lima (5) tahun pertama keberadaan Dana Minyak, dengan memperhatikan ukuran Dana Minyak.

## Pasal 10 Dewan Penasihat Investasi

10.1 Dengan ini didirikan sebuah Dewan Penasihat Investasi yang bertanggung jawab atas:

- (a) Perkembangan situasi tinggi rendahnya pengembalian investasi yang diinginkan dan resiko-resiko yang pantas dari investasi Dana Minyak untuk Menteri;
- (b) Menasihati Menteri mengenai instruksi-instruksi investasi yang harus disediakan oleh Menteri kepada para manajer investasi Dana Minyak yang diangkat sesuai Pasal 8;
- (c) Menasihati Menteri mengenai penampilan para manajer investasi atau para manajer dan membuat rekomendasi-rekomendasi kepada Menteri mengenai pengangkatan atau penggantian para manajer investasi; dan
- (d) Menasihati Menteri mengenai kebutuhan perubahan-perubahan di dalam keseluruhan strategi investasi atau manajemen Dana Minyak, termasuk membuat rekomendasi-rekomendasi mengenai perubahan-perubahan itu.

10.2 Tunduk pada Pasal 10.3, Menteri harus meminta nasihat kepada Dewan Penasihat Investasi sebelum membuat keputusan mengenai setiap persoalan berkaitan dengan strategi atau manajemen investasi Dana Minyak. Jika Dewan Penasihat Investasi tidak memberikan nasihat yang diminta tepat waktu, dengan memperhatikan sifat nasihat yang diminta, Menteri harus membuat keputusan.

10.3 Dengan memperhatikan sifat keputusan, jika tidak cukup waktu untuk meminta nasihat Dewan Penasihat Investasi berkaitan dengan keputusan khusus, Menteri harus membuat keputusan tanpa meminta nasihat terlebih dahulu kepada Dewan Penasihat Investasi.

10.4 Jika Menteri membuat sebuah keputusan menurut Pasal 10.2 atau 10.3, Menteri harus melaporkan sesegera mungkin pembuatan keputusan itu kepada Dewan Penasihat Investasi. Menteri harus menguji ulang keputusan dengan memperhatikan nasihat yang cukup dari Dewan Penasihat Investasi.

10.5 Setiap nasihat yang diberikan oleh Dewan Penasihat Investasi mengenai strategi atau manajemen investasi Dana Minyak akan memperhitungkan:

- (a) Seluruh tujuan bahwa Dana Minyak menjadi sebuah dana pendapatan dari eksploitasi sumber-sumber daya minyak yang tidak dapat diperbaharui demi keuntungan generasi-generasi sekarang dan masa mendatang;
- (b) Kondisi-kondisi sekarang, kesempatan-kesempatan dan tekanan-tekanan di bawah pasar-pasar investasi, dan tekanan-tekanan di bawah pasar-pasar investasi dimana Bank Sentral dan institusi-institusi utama lainnya beroperasi di Timor-Leste; dan
- (c) Kebutuhan untuk memastikan bahwa jumlah yang cukup tersedia pada saat dibutuhkan untuk pemindahan menunjuk Pasal 7.

10.6 Para anggota Dewan Penasihat Investasi seharusnya:

- (a) Direktur Perbendaharaan;
- (b) Kepala Bank Sentral;
- (c) Dua orang yang diangkat oleh Menteri dengan pengalaman khusus dalam manajemen investasi; dan
- (d) Satu orang lain diangkat oleh Menteri.

10.7 Bank Sentral harus menyediakan sekretariat untuk Dewan Penasihat Investasi dan setiap dukungan yang diminta oleh Dewan untuk melaksanakan fungsi-fungsinya.

10.8 Sesuai dengan hukum Timor-Leste, Menteri harus menyediakan:

- (a) Seseorang untuk duduk di sekretariat Dewan Penasihat Investasi; dan
- (b) Gaji yang pantas bagi para anggota Dewan Penasihat Investasi yang diangkat menurut Pasal 10.6(c) dan 10.6(d).

10.9 Dewan Penasihat Investasi harus menentukan aturan-aturan prosedural yang akan berlaku.

10.10 Pada saat diminta oleh Parlemen, Pemerintah harus menyediakan kepada Parlemen dengan semua nasihat-nasihat yang diberikan Dewan Penasihat Investasi kepadanya. Menteri akan memastikan bahwa dalam mengeluarkan, atau mengizinkan akses kepada Parlemen, nasihat-nasihat diberikannya, cara-cara yang diambil untuk mencegah kebocoran informasi yang rahasia.

## Pasal 11

### Tidak Ada Halangan mengenai Asset-Asset Dana Minyak

11.1 Setiap jumlah yang diinvestasikan sesuai Pasal 9 harus masih milik Timor-Leste dari waktu ke waktu.

11.2 Setiap kontrak, perjanjian atau persiapannya, dengan segala kekuasaan bahwa itu berintikan untuk menghalangi asset-asset Dana Minyak, apakah dengan jalan menjaminkan, keamanan, menggadaikan atau setiap bentuk halangan lain adalah batal dan tidak berlaku.

#### **Bab IV – Pengawasan Dana Minyak**

##### Pasal 12

##### Pemeliharaan Rekening dan Dokumentasi Dana Minyak

12.1 Direktur Perbendaharaan bertanggung jawab atas rekening-rekening Dana Minyak dan dokumen-dokumen sesuai dengan Standar Akuntansi Internasional yang diberlakukan, untuk mencerminkan situasi operasional dan keuangan Dana Minyak.

12.2 Direktur Perbendaharaan harus mengajukan laporan-laporan manajemen empat bulanan dan analisa-analisa mengenai penampilan dan kegiatan-kegiatan Dana Minyak tidak lebih dari duapuluh (20) hari setelah hari terakhir setiap empat bulan kepada Menteri.

12.3 Direktur Perbendaharaan bertanggung jawab untuk melaporkan penampilan dan kegiatan-kegiatan Dana Minyak untuk tujuan pernyataan-pernyataan keuangan tahunan Timor-Leste.

##### Pasal 13

##### Audit Internal

Rekening-rekening, rekaman-rekaman, dan pernyataan-pernyataan keuangan Dana Minyak seharusnya diaudit setiap enam bulan oleh badan-badan Pemerintah yang bertanggung jawab untuk audit internal departemen-departemen Pemerintah yang menaruh perhatian.

##### Pasal 14

##### Laporan Tahunan

14.1 Menteri/Pemerintah harus mengajukan sebuah Laporan Tahunan untuk Dana Minyak satu tahun fiskal kepada Parlemen, bersamaan dengan pernyataan-pernyataan keuangan tahunan tahun tersebut diajukan kepada Parlemen.

14.2. Laporan Tahunan untuk Dana Minyak harus dipersiapkan dalam sebuah cara yang membuatnya siap untuk digunakan bagi informasi umum, dan harus mengandung informasi tahun fiskal yang dipersiapkan dalam laporan, sebagai berikut:

- (a) Pernyataan-pernyataan keuangan yang telah diaudit oleh auditor independen, terdiri dari:
  - (i) Sebuah pernyataan pendapatan dan pengeluaran;
  - (ii) Sebuah lembaran sisa uang, termasuk sebuah daftar catatan mengenai perangkat-perangkat berkualitas dari Dana Minyak;
  - (iii) Data lengkap semua dana dan pemindahan-pemindahan dari Dana Minyak; dan
  - (iv) Catatan-catatan terhadap pernyataan-pernyataan keuangan yang cocok;
- (b) Sebuah laporan yang ditandatangani oleh Menteri yang menggambarkan kegiatan-kegiatan Dana selama tahun yang bersangkutan, termasuk semua nasihat yang disediakan oleh Dewan Penasihat Investasi, setiap laporan yang disiapkan oleh auditor independen menurut Pasal 20

- dan menggambarkan perhatian terhadap isu-isu tertentu atau masalah-masalah yang bisa menjadi perhatian atau kepentingan kepada Parlemen;
- (c) Sebuah pernyataan oleh Bendahara yang menggambarkan perhatian terhadap isu-isu perhitungan atau pelaksanaan-pelaksanaan yang muncul dari Laporan yang secara material bisa berdampak pada interpretasi jumlah uang atau kegiatan yang ditampilkan di dalamnya;
  - (d) Pendapatan yang diperoleh dari investasi asset-asset Dana Minyak selama tahun fiskal dibandingkan dengan pendapatan tiga tahun fiskal sebelumnya;
  - (e) Sebuah perbandingan pendapatan nominal yang ada pada investasi asset-asset Dana Minyak dengan kembalian yang nyata setelah menyesuaikan inflasi;
  - (f) Sebuah perbandingan pendapatan yang diperoleh dari investasi asset-asset Dana Minyak dengan index-index penampilan tinggi rendah yang diberikan kepada Menteri sesuai Pasal 10.1;
  - (g) Sebuah perbandingan pendapatan berkelanjutan yang telah diperkirakan untuk tahun fiskal dengan sejumlah pemindahan-pemindahan dari Dana Minyak untuk tahun tersebut;
  - (h) Pada peristiwa Pemerintah meminjam, pertanggungjawaban-pertanggungjawaban harus dicerminkan dalam presentasi rekening-rekening Dana Minyak sehingga memberikan sebuah presentasi yang benar mengenai perkembangan asset-asset keuangan pendapatan bersih Pemerintah dan rata-rata tabungan di masa lampau dan yang diharapkan; dan
  - (i) Sebuah daftar orang-orang yang memegang posisi-posisi yang relevan bagi operasional dan penampilan Dana Minyak, termasuk:
    - (i) Menteri;
    - (ii) Direktur Perbendaharaan;
    - (iii) Para anggota Dewan Penasihat Investasi;
    - (iv) Para manajer investasi atau para manajer;
    - (v) Kepala Bank Sentral; dan
    - (vi) Para anggota Dewan Konsultasi Dana Minyak.

## **Bab V – Dewan Konsultasi Dana Minyak**

### Pasal 15

#### Dewan Konsultasi Dana Minyak

15.1 Dengan ini telah berdiri sebuah Dewan Konsultasi Dana Minyak.

15.2 Dewan Konsultasi Dana Minyak akan:

- (a) menasihati Parlemen mengenai masalah-masalah yang berkaitan dengan situasi dan operasional Dana Minyak;
- (b) menasihati Parlemen mengenai dana dari Dana Minyak sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 17.2; dan
- (c) dalam konteks proses pembuatan anggaran, menasihati Parlemen mengenai apakah Dana Minyak digunakan secara efektif untuk keuntungan generasi-generasi sekarang dan masa depan.

### Pasal 16

#### Komposisi

16.1 Dewan Konsultasi Dana Minyak harus terdiri dari para anggota, yang diangkat sesuai dengan prosedur-prosedur yang ditetapkan oleh Parlemen, sebagai berikut:

- (a) para mantan Presiden Republik yang tidak digantikan dari kantor;

- (b) para mantan Pembicara Parlemen yang secara efektif berada di kantor paling tidak selama tiga (3) tahun;
- (c) para mantan Perdana Menteri yang secara efektif berada di kantor paling tidak selama tiga (3) tahun;
- (d) para mantan Menteri yang bertugas di bidang keuangan yang secara efektif berada di kantor paling tidak selama tiga (3) tahun;
- (e) para mantan Kepala Bank Sentral yang secara efektif berada di kantor paling tidak selama tiga (3) tahun;
- (f) seorang anggota yang diangkat oleh Presiden Republik;
- (g) seorang anggota yang diangkat oleh Parlemen;
- (h) seorang anggota yang diangkat oleh Pemerintah;
- (i) seorang anggota yang diangkat untuk mewakili organisasi-organisasi masyarakat sipil non profit;
- (j) seorang anggota yang diangkat untuk mewakili sektor bisnis swasta; dan
- (k) seorang anggota yang diangkat untuk mewakili organisasi-organisasi keagamaan.

16.2 Para anggota Dewan Konsultasi Dana Minyak menunjuk dalam paragraf (a), (b) dan (c) Pasal 16.1 diangkat dari akhir periode mereka di kantor untuk periode sepuluh (10) tahun. Para anggota ini tidak berhak untuk diangkat kembali.

16.3 Para anggota Dewan Konsultasi Dana Minyak menunjuk dalam paragraf (d) dan (e) Pasal 16.1 diangkat dari akhir periode mereka di kantor untuk periode lima (5) tahun. Para anggota ini tidak berhak untuk diangkat kembali.

16.4 Para anggota Dewan Konsultasi Dana Minyak menunjuk dalam paragraf (f), (g), (h), (i), (j) dan (k) Pasal 16.1 diangkat untuk periode tiga (3) tahun. Para anggota ini berhak untuk diangkat kembali untuk periode kedua.

16.5 Para anggota Dewan Konsultasi Dana Minyak menunjuk dalam paragraf (i), (j) dan (k) Pasal 16.1 harus diangkat menurut prosedur-prosedur yang ditetapkan oleh Parlemen.

16.6 Tunduk pada pengesahan oleh Parlemen, Dewan Konsultasi Dana Minyak boleh menyeleksi dan mengangkat seorang akademisi atau profesional yang mempunyai reputasi dan kewenangan yang tertinggi sebagai penasihat internasional untuk persoalan-persoalan ekonomi dan keuangan, untuk periode dua (2) tahun.

16.7 Seseorang tidak bisa diangkat sebagai anggota Dewan Konsultasi Dana Minyak jika orang tersebut:

- (a) telah diumumkan secara luas bangkrut atau pailit; atau
- (b) didakwa atas pelanggaran pidana.

16.8 Para anggota Dewan Konsultasi Dana Minyak mempunyai keamanan jabatan dan akibatnya tidak bisa ditangguhkan, pensiun atau digantikan dari kantor kecuali ditetapkan oleh hukum.

16.9 Pengangkatan seorang anggota Dewan Konsultasi Dana Minyak berhenti jika anggota:

- (a) telah diumumkan secara luas bangkrut atau pailit;
- (b) didakwa atas pelanggaran pidana; atau
- (c) tidak sehat untuk kantor.

[16.10 Hingga beberapa waktu karena prosedur-prosedur khusus untuk penggantian seorang anggota menurut paragraf (c) Pasal 16.9 dibuat oleh hukum, prosedur-prosedur yang diberlakukan untuk menggantikan para hakim harus berlaku]

### Pasal 17

#### Prinsip-Prinsip Kerja dan Kekuasaan-Kekuasaan Dewan Konsultasi Dana Minyak

17.1 Dalam melaksanakan kegiatan-kegiatannya, Dewan Konsultasi Dana Minyak harus memperhitungkan:

- (a) Seluruh tujuan bahwa Dana Minyak menjadi sebuah dana pendapatan dari eksploitasi sumber-sumber daya minyak yang tidak dapat diperbaharui demi keuntungan generasi-generasi sekarang dan masa mendatang; dan
- (b) Prinsip-prinsip untuk operasional Dana Minyak sebagaimana digariskan dalam Undang-Undang ini.

17.2 Pada saat:

- (a) Pemerintah memperkenalkan perundang-undangan kepada Parlemen untuk suatu jumlah dana dari Dana Minyak, dan
- (b) Jumlah perundang-undangan akan tepat dalam tahun fiskal adalah lebih besar daripada pendapatan berkelanjutan yang telah ditetapkan Dana Minyak untuk tahun fiskal, Dewan Konsultasi Dana Minyak harus mengajukan sebuah opini kepada Parlemen mengenai dana yang diusulkan Pemerintah tepat waktu. Jika Dewan Konsultasi Dana Minyak tidak memberikan opininya tepat waktu, Parlemen harus membuat keputusan.

17.3 Parlemen harus menyediakan penyebarluasan nasihat-nasihat Dewan Konsultasi Dana Minyak, termasuk opini-opini minoritas, dalam segala bentuk dan cara sebagaimana digunakan untuk informasi umum. Parlemen harus memastikan bahwa dalam mengeluarkan, atau atau mengizinkan akses kepada Dewan Konsultasi Dana Minyak, nasihat-nasihat dari Dewan Konsultasi Dana Minyak, langkah-langkah yang diambil untuk mencegah kebocoran informasi yang rahasia.

17.4 Untuk tujuan-tujuan menasihati Parlemen, Dewan Konsultasi Dana Minyak harus mengkonsultasikan secara luas di dalam masyarakat dan harus menyelenggarakan sebuah forum tahunan mengenai persoalan-persoalan yang berkaitan dengan Dana Minyak hingga selesai.

17.5 Dewan Konsultasi Dana Minyak harus menentukan aturan-aturan prosedural yang akan dilaksanakan.

17.6 Parlemen harus menyediakan dana yang cukup untuk operasional Dewan Konsultasi Dana Minyak, termasuk gaji yang pantas untuk para anggota Dewan Konsultasi Dana Minyak, melalui dana yang dianggarkan untuk operasional Parlemen.

17.7 Menteri dan/atau Kepala Bank Sentral akan melengkapi Dewan Konsultasi Dana Minyak dengan informasi yang diminta mengenai setiap aspek operasional atau situasi Dana Minyak untuk tujuan pemantauan Dana Minyak. Dewan Konsultasi Dana Minyak harus memastikan bahwa langkah-langkah yang diambil mencegah kebocoran informasi yang rahasia.

## **Bab VI – Transparansi**

### Pasal 18

#### Transparansi sebagai sebuah prinsip yang mendasar



18.1 Manajemen Dana Minyak selalu dilaksanakan dan semua tugas para pihak yang berkaitan seharusnya dihentikan dengan standar transparansi tertinggi. Kecuali ditunjukkan bahwa informasi tertentu seharusnya dianggap rahasia, ini seharusnya dipertimbangkan kerentanan pengumuman kepada publik.

18.2 Dalam pelaksanaan fungsi-fungsi dan kewenangan-kewenangannya, dan sebagaimana disediakan dalam Undang-Undang ini, Parlemen, Menteri, Bank Sentral, Dewan Penasihat Investasi dan Dewan Konsultasi Dana Minyak akan mengambil cara-cara yang perlu untuk memastikan mekanisme transparansi dan akses yang bebas terhadap informasi umum.

18.3 Menteri akan memastikan bahwa Undang-Undang ini, setiap perundang-undangan pengganti yang dibuat di bawahnya, setiap instruksi-instruksi berkaitan dengan Dana Minyak, perjanjian manajemen yang ditunjuk dalam Pasal 8.3 dan laporan-laporan ditunjuk dalam Pasal 7.3 dan 7.4 tersedia dengan baik untuk publik.

#### Pasal 19

#### Pembayaran ke dalam Rekening Dana Minyak

Untuk semua tujuan-tujuan hukum Timor-Leste, sebuah pembayaran yang dibuat sebagai penerimaan Dana Minyak tidak seharusnya dianggap sebagai pembayaran kecuali pembayaran itu didepositkan secara penuh dan efektif di dalam rekening penerimaan-penerimaan peruntukan Dana Minyak.

#### Pasal 20

#### Pembayaran-pembayaran dibuat sebagai Penerimaan-Penerimaan Dana Minyak

20.1 Auditor independen akan menyiapkan sebuah laporan semua pembayaran-pembayaran yang dibuat sebagai penerimaan-penerimaan Dana Minyak setiap tahun fiskal untuk Menteri.

20.2 Laporan auditor independen sebaiknya menyatakan jumlah pembayaran-pembayaran yang terpisah yang dibuat sebagai penerimaan-penerimaan Dana Minyak untuk masing-masing pembayar untuk tahun fiskal.

20.3 Jika ada alasan-alasan yang masuk akal bagi auditor independen untuk percaya bahwa ada ketidaksesuaian antara penerimaan-penerimaan Dana Minyak dan pembayaran-pembayaran yang dibuat sebagai penerimaan-penerimaan Dana Minyak, auditor independen boleh mensyaratkan setiap pembayar untuk menyediakan setiap informasi dan membuktikan fakta-fakta yang perlu untuk klarifikasi ketidaksesuaian semacam ini.

20.4 Jika auditor independen menyimpulkan bahwa ada ketidaksesuaian yang tidak dapat dihitung peruntukannya, auditor independen sebaiknya membawa persoalan tersebut ke Menteri. Dalam membawa persoalan tersebut kepada Menteri, auditor independen akan menyediakan semua informasi yang ia miliki mengenai ketidaksesuaian tersebut dalam bentuk pertanyaan.

20.5 Menteri sebaiknya menyediakan penerbitan laporan auditor independen dalam sebuah bentuk dan cara yang bisa dipergunakan untuk informasi bagi publik. Auditor sebaiknya memastikan bahwa dalam mempersiapkan langkah-langkah pelaporan dilakukan untuk mencegah kebocoran informasi rahasia.

### **Bab VII – Sanksi-Sanksi**

Pasal 21-A  
Ruang Lingkup

Ketentuan-ketentuan yang termasuk dalam Bab ini tanpa prasangka pertanggungjawaban pidana dan perdata menurut hukum umum.

Pasal 21-B hingga “n”

[Akan dirancang pada tahap berikutnya, memperhitungkan perkembangan sistem hukum pidana umum yang diharapkan akan ada di dalam waktu dekat.]

**Bab VIII – Ketentuan-Ketentuan Peralihan dan Akhir**

Pasal 22

Pengangkatan para Manajer Investasi

Syarat Pasal 8.6 mulai berlaku enam (6) bulan setelah tanggal diberlakukannya Undang-Undang ini, dan akan berlaku bagi semua pengangkatan para manajer investasi yang dibuat kemudian. Setiap pengangkatan para manajer investasi dibuat selama enam (6) bulan setelah tanggal berlakunya Undang-Undang ini akan diubah setelah jangka waktu lima (5) tahun menunjuk pada Pasal 9.6.

Pasal 23

Auditor Independen

Waktu hirarki administrasi, pajak dan pengadilan audit didirikan, dan tanpa prasangka terhadap kekuasaan-kekuasaan dan pihak-pihak yang berwenang dari pengadilan-pengadilan semacam ini, seharusnya diangkat seorang auditor independen, yang mana sebuah firma akuntan diakui secara internasional dipilih oleh Pemerintah.

Pasal 24

Hukum-Hukum Pengganti dan Regulasi-Regulasi

Pemerintah dan Kementerian bisa membuat regulasi-regulasi untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan Undang-Undang dengan efektif termasuk regulasi-regulasi sebuah konsekuensi masa peralihan pembuatan Undang-Undang ini.

Pasal 25

Pemberlakuan dan pelaksanaan

25.1 Undang-Undang ini mulai berlaku pada hari berikutnya setelah Undang-Undang ini dipublikasikan di dalam *Jornal da República*.

25.2 Undang-Undang ini berlaku pada masa peralihan tahun-tahun fiskal atau setelah 1 Juli 2005.

Jadwal 1

Menghitung pendapatan berkelanjutan yang diperkirakan untuk satu tahun fiskal

I. Pendapatan berkelanjutan yang diperkirakan untuk satu tahun fiskal adalah jumlah maksimum yang bisa cocok dari Dana Minyak pada tahun fiskal itu dan menyisakan sumber-sumber daya yang cukup di dalam Dana Minyak untuk sebuah jumlah nilai nyata yang setara menjadi cocok di dalam semua

tahun-tahun fiskal berikutnya sebagaimana ditentukan sesuai dengan formula di dalam paragraf II di bawah ini seharusnya ditandai oleh auditor independen.

II. Pendapatan berkelanjutan yang diperkirakan untuk sebuah tahun fiskal dihitung menurut formula berikut:

$r \times \text{kekayaan minyak}$

dimana:

$r$  adalah 3.0% rata-rata pengembalian nyata, atau rata-rata bunga nyata, pada investasi-investasi Dana Minyak di masa depan, dan permulaan Undang-Undang ini.  $s$  the estimated average real rate of return, or real interest rate, on Petroleum Fund investments in the future and, at the commencement of this present Act.

III. Dalam Jadwal ini, “kekayaan minyak” dihitung sesuai dengan formula berikut ini:

$$V + \text{nilai sekarang } (R_1, R_2, \dots, R_n) = V + \sum_{t=1}^n \frac{R_t}{(1+i)^t}$$

dimana:

$V$  nilai Dana Minyak yang diperkirakan pada akhir tahun fiskal sebelumnya

$R_1, R_2, \dots, R_n$  adalah perkiraan-perkiraan anggaran yang diumumkan untuk penerimaan-penerimaan Dana Minyak tahunan yang diharapkan bagi tahun fiskal itu ( $R_1$ ) dan tahun-tahun fiskal di masa datang ( $R_2, \dots, R_n$ .)

$i$  adalah hasil nominal yang diperkirakan pada keamanan Pemerintah Amerika Serikat, rata-rata tahun-keseluruhan dimana penerimaan-penerimaan Dana Minyak yang diharapkan

$n$  adalah jumlah tahun hingga tidak ada lagi penerimaan-penerimaan Dana Minyak yang diproyeksikan akan diterima.

Disahkan dalam Dewan Menteri, pada ..... 2005

Perdana Menteri

---

Mari Alkatiri

Menteri Perencanaan dan Keuangan

---

Madalena Boavida